



Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi.

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Sjarudin Mosii. SE. MM.

BSM Cegah Siswa Putus Sekolah

MASYARAKAT miskin mendapatkan bantuan pembiayaan pendidikan anak sekolah dengan rincian SD Rp425 ribu, SMP Rp575 ribu, dan SMA/SMK Rp700 ribu, untuk membiayai anak-anaknya yang sedang mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Masyarakat menyambut baik dan berterima kasih atas bantuan dana pendidikan yang diberikan pemerintah.

Hapiah (45 tahun) orang tua siewi yang mendapat bantuan mengungkapkannya, bahwa rasa syukurnya dan terima kasih atas bantuan pendidikan yang dikucurkan pemerintah untuk masyarakat miskin yang diterima anaknya sebesar Rp300 ribu perbulan. "Anak saya ada 5 orang dan

yang menerima bantuan ini nomor oleh negara, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pada ayat selanjutnya disebut setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Sjarudin menambahkan, untuk mewujudkan cita-cita negara dalam bidang pendidikan tersebut maka dalam APBN 2011 sampai dengan 2013, nilai anggaran dalam pendidikan diokasikan lebih dari 20 persen dari total anggaran belanja dan nilainya juga terus meningkat, yaitu sebesar Rp266,9 triliun pada tahun 2011, Rp297 triliun pada tahun 2012, dan Rp336,8 triliun pada tahun 2013. Namun demikian, tingginya anggaran tersebut yang dibelikan belum sejalan dengan jumlah ketulusan peserta didik, tingkat kemiskinan masyarakat merupakan salah satu penyebabnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diharapkan dapat membantu seluruh warga negara mendapatkan pendidikan tidak dapat menjamin seluruh warga negara untuk ikut pendidikan.

"Ternyata masih banyak anak-anak yang miskin tidak mampu bersekolah disebabkan orang tua murid tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan seperti buku tulis, baju, sepatu, biaya transportasi maupun

biaya pendidikan lainnya yang tidak ditanggung dana BOS. Hal inilah yang mendasari dikembangkannya BSM," ungkapnya.

Dijelaskannya, Program BSM adalah program nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin untuk akses peyanaan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah dan mendukung program wajib belajar 9 tahun. "Harapannya anak usia sekolah dari keluarga miskin dapat terus bersekolah, dan dimasa depan diharapkan mereka dapat memurus rantai kemiskinan yang

saat ini dialami orangtuanya," jelas Sjarudin.

Direktorat Pembina SMA Kemdikbud RI, Haris Iskandar menjelaskan, ada beberapa kriteria penerima BSM. Disebutkan dia, diantaranya pemegang Kartu Penjamin Sosial (KPS) yatim piatu, dan anak-anak panti sosial. "Untuk mendapatkan BSM disalurkan melalui Bank BPP, cukup membawa kartu pelajar ke bank dan langsung akan mendapatkan buku rekening, tapi uangnya akan diambil semua, untuk dituangkan ke rekening. Ia menambahkan, sejauh ini penerima BSM ini masih tepat sasaran dan jumlah uang yang diterima juga tetap serta waktunya tidak terlambat."



SIMBOLIS: Direktur Pembinaan SMA Ir.Harris Iskandar.Ph.D secara simbolis menyerahkan BSM kepada siswa berupa buku tabungan.



Plt. Sekda Ketapang. Drs. H.Mahyudin.M.Si



SERAHKAN BSM: Anggota BPK RI Dr. Moermahadi Soerjadjanegara,Se,Ak,MM,CPA menyerahkan BSM secara simbolis kepada siswa.



Anggota DPR RI Komisi XI Drs. Kamaruddin Sjani.MM.